

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengembangan Wilayah

Pembangunan wilayah direncanakan melalui pengembangan wilayah yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan antar daerah serta mengupayakan keserasian yang dilihat berdasarkan potensi di daerah tersebut (Riyadi, 2009). Pengembangan wilayah merupakan strategi dalam memanfaatkan serta mengkombinasikan faktor internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan wilayah dengan faktor eksternal yang merupakan peluang dan tantangan wilayah. Pada pengembangan wilayah memanfaatkan potensi dan peluang yang ada untuk dapat meningkatkan produksi di suatu wilayah (Evariani, 2012). Menurut Soegijoko, *et al.*, (1997), pengembangan wilayah merupakan suatu upaya dalam pemerataan pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu yang dapat dikembangkan melalui kegiatan sektoral sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Pendapat lain dikemukakan oleh Adisasmita (2008) bahwa pengembangan wilayah adalah suatu upaya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan wilayah dengan memanfaatkan berbagai sumber seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, dan sumber daya teknologi serta memanfaatkan prasarana fisik secara efektif dan berkelanjutan.

Pengembangan wilayah dilakukan karena terdapat perbedaan kondisi sosial ekonomi, budaya, dan geografis. Oleh karena itu, dalam melakukan pengembangan wilayah perlu menyesuaikan dengan kondisi, serta potensi dan masalah di wilayah tersebut. Terwujudnya pengembangan wilayah dilakukan berdasarkan pembangunan sektoral dan regional karena kedua hal tersebut saling berkaitan (Riyadi dalam Sugiari, 2018). Adanya keterpaduan sektoral, spasial, dan keterpaduan antar pelaku pembangunan dinilai penting dalam pengembangan wilayah karena keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional suatu daerah (Nofitasari, 2016). Dengan adanya pengembangan wilayah maka dapat

memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup dengan menciptakan pusat-pusat produksi serta memberikan kemudahan dalam prasarana dan pelayanan logistik di suatu daerah (Utomo dalam Trisunito, 2017).

Pembangunan daerah yang dilakukan melalui pengembangan wilayah dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang meliputi pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Kedua pendekatan tersebut saling berkaitan karena pendekatan sektoral kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan. Sedangkan untuk pendekatan regional memperhatikan ruang dan merupakan penghubung antara perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang. Pendekatan sektoral berhubungan dengan perekonomian daerah yang dilakukan dengan mengelompokkan sektor-sektor yang terdapat di wilayah perencanaan yang kemudian setiap sektor tersebut dilihat potensi dan peluangnya. Pendekatan regional memiliki dua pendekatan yaitu pendekatan ekonomi dan pendekatan ruang yang dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan dan penggunaan ruang yang kemudian pada lokasi tersebut dapat dilakukan perencanaan kegiatan di wilayah tersebut (Tarigan, 2016).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Prasetyo, *et al.*, (2020) bahwa pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan wilayah meliputi pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral bersifat parsial, sedangkan untuk pendekatan regional bersifat spasial dengan dikelompokkan berdasarkan batas administrasi seperti batas provinsi, batas kabupaten/kota, batas kecamatan, serta batas kelurahan/desa. Sedangkan menurut Rustiadi dalam Nofitasari (2016), pengembangan wilayah memandang pentingnya keterpaduan beberapa pendekatan, diantaranya yaitu pendekatan sektoral, pendekatan spasial, dan pendekatan antar pelaku pembangunan di suatu wilayah. Karena wilayah dapat dikatakan berkembang ditunjukkan berdasarkan adanya keterkaitan antar sektor ekonomi wilayah.

Berdasarkan penjelasan terkait pendekatan pengembangan wilayah yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Pendapat-pendapat tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Diskusi dan Komparasi Teori Terkait Pendekatan Pengembangan Wilayah**

NO	SUMBER	PENDEKATAN PENGEMBANGAN WILAYAH
1	Tarigan (2016)	Pendekatan sektoral
		Pendekatan regional
2	Prasetyo, <i>et al.</i> , (2020)	Pendekatan sektoral
		Pendekatan regional
3	Rustiadi dalam Nofitasari (2016)	Pendekatan sektoral
		Pendekatan spasial
		Pendekatan antar pelaku pembangunan

*Sumber: Hasil Pustaka, 2020*

Setelah dilakukan diskusi dan komparasi teori terkait pendekatan pengembangan wilayah pada tabel 2.1 dapat diketahui bahwa menurut Tarigan (2016) dan Prasetyo, *et al.*, (2020), terdapat dua pendekatan dalam pengembangan wilayah yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendapat lain diungkapkan oleh Rustiadi dalam Nofitasari (2016) bahwa terdapat tiga pendekatan lain dalam pengembangan wilayah, yaitu pendekatan sektoral, pendekatan spasial, dan pendekatan antar pelaku pembangunan. Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sektoral dan regional karena mengacu pula pada dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2019-2023 bahwa pendekatan pengembangan wilayah di Kota Samarinda menggunakan pendekatan sektoral dan regional.

## 2.2 Pendekatan Sektoral dalam Pengembangan Wilayah

Salah satu pendekatan dalam melakukan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah yaitu dengan menggunakan pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral adalah pengelompokan aktivitas ekonomi ke dalam sektor-sektor yang terdapat di suatu wilayah yang terbagi menjadi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer dalam pendekatan sektoral meliputi sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder meliputi sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, dan sektor konstruksi. Dan untuk sektor tersier meliputi sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa perusahaan, dan sektor

jasa-jasa (Tarigan, 2004). Pendapat yang sama diungkapkan oleh Sinaga (2013) bahwa pendekatan sektoral merupakan pendekatan dengan kegiatan ekonomi dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor dalam wilayah perencanaan. Menurut Zai dan Pangi (2017), pendekatan sektoral dilakukan dalam pengembangan wilayah yang diarahkan pada sektor unggulan dan berkembang.

Sektor unggulan merupakan sektor yang berpotensi untuk tumbuh cepat dibandingkan dengan sektor lainnya serta terdapat faktor pendukung seperti akumulasi modal, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, serta kemajuan teknologi (Rachbini, 2001). Sektor unggulan dapat dibandingkan pada skala internasional maupun skala regional. Sektor unggulan pada lingkup internasional adalah sektor yang mampu bersaing dengan sektor yang terdapat di negara lain. Sedangkan sektor unggulan pada lingkup regional adalah sektor yang mampu bersaing dengan sektor yang terdapat di wilayah lain (Tambunan, 2001). Pendapat yang sama didukung oleh Saharuddin (2006) bahwa sektor unggulan sektor yang memiliki daya saing jika di luar wilayah, tidak hanya di wilayahnya sendiri. Sedangkan menurut Widodo (2006), sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah serta mampu mengembangkan sektor-sektor lainnya.

Sektor unggulan dapat dijadikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah karena sektor unggulan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi untuk dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dinilai berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena PDRB menunjukkan tingkat pertumbuhan nilai tambah dari setiap lapangan usaha (Kesuma dan I Made, 2015). Peran PDRB dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dinilai penting karena semakin tinggi nilai PDRB maka tinggi pula pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Hasibuan, 2015). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Sambado dalam Usya (2006), bahwa sektor unggulan merupakan tumpuan dalam kegiatan ekonomi karena sektor unggulan berperan besar dalam perekonomian di suatu daerah. Besarnya peranan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah didasarkan pada beberapa kriteria, seperti sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang tinggi, sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang tinggi, sektor yang memiliki keterkaitan ke

depan dan ke belakang yang tinggi, dan sektor yang menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Pendapat yang sama diungkapkan pula oleh Tarigan dalam Muta'ali (2015) bahwa kriteria sektor unggulan yaitu memiliki laju pertumbuhan yang relatif besar, angka penyerapan tenaga kerja tinggi, memiliki keterkaitan yang tinggi antar sektor, dan mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Sedangkan menurut Firmansyah (2013), empat kriteria sektor unggulan yaitu penyerapan tenaga kerja tinggi, memiliki daya saing, teknologi, dan peluang investasi. Menurut Trijayanto (2017), terdapat tiga kriteria sektor unggulan, yaitu sektor basis, sektor yang mempunyai daya saing, serta sektor maju dan tumbuh pesat. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Hutabarat (2020), bahwa terdapat beberapa kriteria dalam penentuan sektor unggulan, yaitu sektor basis dan sektor yang menciptakan kenaikan pada kinerja ekonomi daerah. Sektor dapat dikatakan basis jika sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi dan mempunyai keunggulan kompetitif. Selain itu, sektor yang menciptakan kenaikan pada kinerja ekonomi daerah dilihat berdasarkan komponen pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kemudian dapat diketahui sektor yang tumbuh cepat dan sektor yang memiliki daya saing.

Berdasarkan penjelasan terkait sektor unggulan, dapat diketahui penjelasan terkait sektor unggulan yang dikemukakan oleh beberapa pakar. Pendapat-pendapat tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.2 Diskusi dan Komparasi Teori Sektor Unggulan**

NO	SUMBER	SEKTOR UNGGULAN
1	Kesuma dan I Made (2015)	Pertumbuhan ekonomi
2	Sambado dalam Usya (2006)	Pertumbuhan ekonomi
3	Sambado dalam Usya (2006) dan Tarigan dalam Muta'ali (2015)	Laju pertumbuhan tinggi
		Menyerap tenaga kerja yang tinggi
		Memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi
		Menciptakan nilai tambah yang tinggi
4	Firmansyah (2013)	Penyerapan tenaga kerja tinggi
		Memiliki daya saing
		Teknologi
5	Trijayanto (2017)	Peluang investasi
		Sektor basis

NO	SUMBER	SEKTOR UNGGULAN
		Memiliki daya saing
		Maju dan tumbuh cepat
		Sektor basis
6	Hutabarat (2020)	Menciptakan kenaikan pada kinerja ekonomi daerah

*Sumber: Hasil Pustaka, 2020*

Pada tabel 2.2 dilakukan diskusi dan komparasi teori terkait sektor unggulan yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, dapat diketahui bahwa menurut Kesuma dan I Made (2015) dan Sambado dalam Usya (2006), sektor unggulan memiliki pengaruh dan berperan besar terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah. Peranan sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi didasarkan pada kriteria sektor unggulan yang mana menurut Trijayanto (2017) dan Hutabarat (2020), salah satu kriteria sektor unggulan yaitu sektor basis. Yang mana sektor basis merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. Pernyataan tersebut diungkapkan pula oleh Sambado dalam Usya (2006), Tarigan dalam Muta'ali (2015), dan Firmansyah (2013), bahwa salah satu kriteria sektor unggulan yaitu mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi. Selain itu menurut Trijayanto (2017) kriteria sektor unggulan lainnya yaitu sektor tersebut memiliki daya saing di suatu daerah serta maju dan tumbuh cepat. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Firmansyah (2013) bahwa kriteria sektor unggulan lainnya yaitu sektor tersebut memiliki daya saing. Melalui kriteria-kriteria sektor unggulan tersebut dapat diketahui penentuan sektor unggulan berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah.

### **2.3 Pendekatan Regional Berdasarkan Pengembangan Wilayah**

Pendekatan regional memiliki perbedaan dengan pendekatan sektoral, namun kedua pendekatan tersebut merupakan salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan wilayah yang dilakukan melalui pengembangan wilayah. Menurut Hasyim dan Subagiyo (2017), pendekatan regional adalah pendekatan yang lebih memperhatikan aspek tata ruang atau penggunaan ruang dengan kondisi yang ada. Dalam pendekatan regional, wilayah dipandang sebagai kumpulan berdasarkan bagian-bagian dari wilayah lain yang lebih kecil yang memiliki potensi serta daya

tarik atau daya dorong yang berbeda. Pendekatan regional memiliki keterkaitan dengan pendekatan sektoral yang mana pada pendekatan regional menitikberatkan pada wilayah yang mampu untuk dikembangkan dengan menentukan sektor yang sesuai untuk dikembangkan di wilayah tersebut melalui pendekatan sektoral (Wilonoyudho, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Wujud dari struktur ruang kota meliputi hirarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan yang terdiri dari pusat kota, pusat bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan. Hirarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan tersebut ditunjang oleh sistem sarana serta prasarana seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal karena jaringan jalan merupakan prasarana utama dalam struktur ruang (Surachman, 2012). Selain itu, sistem jaringan prasarana yang meliputi energi, transportasi, sumber daya air, dan telekomunikasi mengintegrasikan serta memberikan layanan untuk setiap fungsi kegiatan di suatu wilayah (Setianingias, 2014).

Pada hakikatnya, pusat-pusat pelayanan memiliki keterkaitan dengan tujuan sosial yaitu adanya usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan penduduk serta usaha untuk mendistribusikan keputuhan penduduk secara merata, baik itu kebutuhan materil maupun kebutuhan spiritual (Sujarto dalam Sitorus, 2019). Pusat pelayanan dapat ditentukan dengan didasari oleh beberapa variabel umum yang dianggap berpengaruh, diantaranya yaitu (Tarigan, 2005):

a. Jumlah Penduduk

Dilihat berdasarkan jumlah penduduk di setiap wilayah yang kemudian diurutkan dari jumlah penduduk yang paling banyak hingga yang paling sedikit.

b. Jumlah Fasilitas

Dilihat berdasarkan banyaknya jumlah fasilitas yang dimiliki suatu wilayah, seperti jumlah fasilitas pendidikan, perdagangan, pasar, dan fasilitas jasa seperti bank.

c. Tingkat Aksesibilitas

Diukur berdasarkan tingkat aksesibilitas suatu wilayah dengan wilayah terdekatnya yang memiliki orde paling tinggi di wilayah tersebut.

Kriteria penilaian dalam penentuan hirarki/orde pusat pelayanan dilakukan berdasarkan urutan dari kelengkapan fasilitas yang tersedia dan nilai indeks sentralitas yang didapatkan (Ermawati, 2010). Penentuan pusat pelayanan yang dibedakan menjadi empat level/orde/. Keempat level/orde memiliki beberapa kriteria diantaranya yaitu (Rondinelli dalam Sitorus, 2019 dan Ermawati, 2010):

a. Level/Orde I

Semua pusat pelayanan pada orde I memiliki minimal 60 dari 64 fasilitas dan memiliki pelayanan minimal setengah dari fasilitas yang tersebar merata. Fungsi pada orde I meliputi fungsi sebagai pusat perdagangan, pusat pelayanan jasa, pusat pemerintahan, serta pusat penyediaan sarana perkotaan. Selain itu, orde I pusat pelayanan memiliki fasilitas pelayanan yang lengkap, kemampuan pelayanan tinggi, jumlah penduduk yang tinggi, daerah pengaruhnya paling kuat, dan biasa berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, dan industri. Orde I merupakan pusat yang tidak berada dalam sub wilayah pusat-pusat lainnya dalam suatu wilayah. Orde ini juga memiliki pengaruh karena melayani seluruh wilayah melalui sub wilayah atau orde II.

b. Level/Orde II

Semua pusat pada orde II memiliki minimal 30 dari 64 fasilitas dan memiliki pelayanan minimal tujuh diantaranya yang tersebar merata. Fungsi pada orde II dapat meliputi fungsi sebagai pusat industri pertanian, pusat perdagangan, maupun pusat penyediaan sarana perkotaan. Orde II memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan yang setingkat lebih rendah dibandingkan dengan orde I. Orde II berada dalam sub wilayah orde I yang melayani pusat-pusat pada sub wilayahnya dan diarahkan agar dapat mengembangkan wilayah yang tidak terjangkau oleh orde I.

c. Level/Orde III

Semua wilayah memiliki minimal 10 dari 64 fasilitas dan memiliki pelayanan minimal dua harus tersebar merata. Fungsi pada orde III dapat meliputi fungsi sebagai pusat penyediaan sarana perkotaan, pusat

perdagangan, pusat pelayanan jasa, dan pusat pertanian. Sejalan dengan kriteria pada orde sebelumnya, pada orde III memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan yang setingkat lebih rendah dibandingkan dengan orde I dan orde II.

d. Level/Orde IV

Semua wilayah memiliki kurang dari 10 fasilitas dan pelayanan. Fungsi pada orde IV yaitu fungsi sebagai pusat pertanian dan pusat penyediaan sarana perkotaan. Pada orde IV memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan yang setingkat lebih rendah dibandingkan dengan orde I, orde II, dan orde III.

Dalam menjalankan fungsi sebagai pusat pelayanan, sistem hirarki pusat pelayanan yang terbentuk memiliki jangkauan skala dan ambang batas. Besar skala pelayanan terdiri dari empat bagian yang akan dijelaskan pada tabel berikut (ESCAP dalam Sitorus, 2019):

**Tabel 2.3 Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan**

INDIKA TOR	TIPE				
	PUSAT REGIONAL/PRO VINSI	PUSAT KOTA	PUSAT KECAMATAN	PUSAT KELURAHAN	
Radius Pelayanan (km)	50 - 100	15 - 25	7.5 - 15	2.5 - 7.5	
Jumlah Penduduk yang Dilayani	200.000 - 800.000	20.000 - 200.000	5.000 - 20.000	500 - 5.000	
Jumlah Penduduk Pada Pusat Pelayanan	25.000 - 100.000	500 - 25.000	500 - 2.500	100 - 1.000	
Jenis Pelayanan	Universitas, Rumah Sakit Umum, Pusat Perdagangan, Pusat Kementerian	Sekolah Menengah, Pasar Permanen, Puskesmas,	Sekolah Dasar, Pasar Mingguan, Apotek, Pelayanan Administrasi	TK, Mantri Kesehatan, Warung, Kepala Desa	

INDIKA TOR	TIPE			
	PUSAT REGIONAL/PRO VINSI	PUSAT KOTA	PUSAT KECAMATAN	PUSAT KELURAHAN
		Pusat pemerintahan		
Infrastruktur	Jalan nasional, bandar udara, terminas bus nasional	Jalan regional dan distrik, landasan terbang darurat, stasiun kereta api kecil, terminal bus distrik	Jalan distrik dan lokal, terminal bus lokal	Jalan lokal, halte
Aktivitas	Komersial, jasa, administrasi pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan	Industri kecil, perdagangan besar, pelayanan distrik	Industri pertanian rakyat, perdagangan kecil, pelayanan lokal	Pertanian, perdagangan kecil

Sumber: *United Nations dalam Hestuadiputri, 2007 dan ESCAP dalam Sitorus, 2019*

Menurut *United Nations* dalam Hestuadiputri (2007), wilayah dengan skala pelayanan kecamatan merupakan wilayah yang berfungsi sebagai penyedia kebutuhan dasar sehari-hari. Sedangkan wilayah dengan skala pelayanan kota merupakan wilayah yang merupakan pusat dari pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan kenyamanan. Kegiatan dari sistem perkotaan terbagi di beberapa pusat pelayanan sesuai dengan hirarki pelayanan dan fungsi dari hirarki tersebut, diantaranya yaitu (Friedmann dalam Hestuadiputri, 2007):

a. Fungsi Primer

Fungsi primer merupakan pusat pelayanan dari wilayah yang mampu merangsang pertumbuhan dari pusat pelayanan yang hirarki pelayanannya lebih rendah. Wilayah pusat dengan fungsi primer dihubungkan dengan tempat pemusatan penduduk tertinggi yang memiliki daerah belakang

yang lebih kuat dan lebih multifungsi dibandingkan dengan pusat pelayanan lain dengan hirarki yang lebih rendah. Fungsi dari pusat pelayanan ini yaitu sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan.

b. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder merupakan pusat dari sub wilayah atau pusat dari orde ke-2 yang diciptakan dengan tujuan untuk mengembangkan sub-sub wilayah lain yang posisinya berada jauh dari pusat pertumbuhan primer, sehingga wilayah yang tidak terjangkau oleh pusat pertumbuhan primer dapat dilakukan oleh pusat pertumbuhan sekunder.

c. Fungsi Tersier

Fungsi tersier merupakan titik pertumbuhan terhadap daerah belakangnya. Perkembangan pada pusat pertumbuhan tersier lebih banyak dipengaruhi oleh pusat sekunder. Selain itu juga pada pusat pertumbuhan tersier juga dapat berkembang karena pengaruh langsung dari pusat pertumbuhan primer jika lokasinya berdekatan dengan pusat pertumbuhan primer.

Selain itu jika dilihat dari fungsi perkotaan, terdapat beberapa fungsi perkotaan sebagai berikut (Wicaksono, 2018):

a. Pusat Perdagangan

Pada pusat perdagangan dibedakan menjadi beberapa tingkat sesuai dengan skala pelayanannya, diantaranya yaitu melayani masyarakat di kota itu sendiri, melayani masyarakat kota dan daerah pinggiran atau daerah yang berbatasan langsung, melayani beberapa kota kecil, melayani pusat provinsi atau pusat kegiatan perdagangan antar pulau, dan melayani pusat beberapa provinsi.

b. Pusat Pelayanan Jasa

Yang termasuk jasa didalamnya yaitu jasa perorangan seperti tukang jahit, salon, pengacara, dokter, notaris, warung kopi, dan tukang pangkas. Selain itu juga jasa perusahaan seperti perhotelan, perbangkan, pelayanan pos, dan asuransi.

c. Tersedia Prasarana Perkotaan

Prasana perkotaan yang dimaksud diantaranya yaitu jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan air minum, jaringan drainase, taman kota, pasar, dan lainnya.

d. Pusat Penyediaan Sarana Perkotaan

Tersedia prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, prasarana peribadatan, prasarana olahraga, dan prasarana perkotaan dengan berbagai skala pelayanan.

e. Pusat Pemerintahan

Pusat pemerintahan biasanya adalah kota terbesar di suatu provinsi. Pusat pemerintahan berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan suatu kota.

f. Pusat Komunikasi dan Pangkalan Transportasi

Masyarakat dapat terhubung ke berbagai tujuan dengan menggunakan berbagai pilihan alat penghubung dan bisa melakukan perjalanan ke berbagai tujuan dengan berbagai pilihan sarana transportasi.

g. Lokasi Permukiman yang Tertata

Permukiman di perkotaan harus meminta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar permukiman tersebut terlihat teratur atau tertata.

Terdapat teori yang membahas terkait pusat pelayanan/pusat pertumbuhan, yaitu Teori Tempat Sentral. Menurut Christaller dalam Yudhistira (2014), tempat sentral atau pusat kegiatan adalah lokasi strategis yang mampu melayani kebutuhan masyarakat. Pusat-pusat kegiatan cenderung tersebar di wilayah berdasarkan pola yang berbentuk heksagon (segi enam) dengan kriteria wilayah tersebut yaitu:

- a. Topografi seragam sehingga tidak ada wilayah yang dipengaruhi dari lereng dan pengaruh alam lain
- b. Kehidupan ekonomi homogen dan tidak terdapat produksi primer yang menghasilkan padi-padian, kayu, atau batu barang

Pusat kegiatan dapat pula diartikan sebagai tempat/pasar yang khusus menyediakan berbagai barang dan jasa bagi penduduk sekitar. Barang yang dimaksud yaitu layanan sederhana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, buku, alat komunikasi dan lainnya. Sedangkan untuk layanan jasa berupa universitas, konsultan, perkantoran, bank, dan lainnya. Penyediaan barang dan jasa

pada orde tinggi membutuhkan dukungan pada orde rendah. Sedangkan untuk orde rendah memenuhi kebutuhan dalam menyediakan layanan pada orde tinggi.

Selain membahas terkait hirarki dan fungsi dari pusat pelayanan, dalam struktur ruang juga membahas terkait kegiatan perekonomian (Zai dan Pangi 2017). Di beberapa wilayah terdapat kawasan perekonomian yang biasa disebut Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, KAPET merupakan wilayah geografis dengan batas tertentu yang memiliki beberapa kriteria yaitu:

- a. Memiliki potensi untuk cepat tumbuh; dan atau
- b. Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan atau
- c. Memiliki potensi pengembalian investasi yang besar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), KAPET merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang mana salah satu kriteria kawasan tersebut yaitu didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan perekonomian. Menurut Mahi dan Trigunarso (2017), sarana dan prasarana penunjang yang dapat mendorong perekonomian yaitu jaringan jalan, sarana pengairan, jembatan, terminal, pasar, kios, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jasa keuangan seperti bank, jaringan air bersih, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan sarana peribadatan.

Selain itu, untuk aktivitas kegiatan perekonomian di setiap daerah yang dikelompokkan menjadi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier membutuhkan sarana dan prasarana penunjang sektor yang berbeda-beda. Sektor primer meliputi Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor sekunder meliputi Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, Sektor Konstruksi. Dan untuk sektor tersier meliputi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Real Estat, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor

Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Sektor Jasa Lainnya (Tarigan, 2004). Berikut merupakan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pada setiap sektor kegiatan perekonomian:

1. Sektor Pertanian

Dalam sektor pertanian membutuhkan beberapa prasarana pendukung kegiatan pertanian seperti bendungan, sumur pompa, saluran irigasi, drainase, serta jaringan jalan (Kalsim, 2010). Selain itu, untuk kebutuhan sarana dan prasarana kawasan pertanian khususnya di perkotaan meliputi jaringan air bersih, jaringan limbah, pelabuhan, jaringan listrik, jaringan komunikasi, gudang, terminal, dan pasar (Padmini, *et al.*, 2016).

2. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Jaringan jalan memiliki peran yang dominan dalam kegiatan perekonomian untuk mendukung pelayanan pusat-pusat kegiatan sektor. Tidak terkecuali untuk sektor pertambangan yang memiliki kebutuhan terhadap jaringan jalan (Putri, 2017). Selain itu, menurut Bappenas (2005), infrastruktur penting dalam kegiatan pertambangan yaitu jalan arteri, jalur rel, serta pelabuhan.

3. Sektor Industri Pengolahan

Berdasarkan Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Industri di Daerah Tahun 2001, standar teknis untuk kawasan industri yaitu jaringan listrik yang bersumber dari PLN atau swasta, jaringan telekomunikasi yang termasuk faximile/telex/telepon umum, jaringan air bersih yang bersumber dari PDAM/air tanah, saluran drainase yang berada di kiri dan kanan jalan utama dan lingkungan, sarana persampahan, dan jaringan jalan yang terdiri dari jalan utama dan jalan lingkungan.

4. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

Menurut Destiningsih, *et al.*, (2019), dalam sektor pengadaan listrik dan gas dibutuhkan ketersediaan jaringan listrik karena sektor ini dapat menunjang kegiatan penduduk di setiap daerah.

5. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

Untuk kegiatan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang ditunjang oleh beberapa sarana dan prasarana, seperti jaringan

air bersih, sarana persampahan, serta saluran irigasi (Destiningsih, *et al.*, 2019).

[www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

6. Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi yang merupakan sektor dalam mendukung tercapainya pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Kegiatan dalam sektor konstruksi yaitu berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jaringan jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, serta bandar udara.

7. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Sektor perdagangan memiliki peran sangat strategis pada kegiatan perekonomian karena memiliki pengaruh terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi. Fasilitas dalam sektor perdagangan meliputi warung/kios, rumah makan/restoran, pertokoan, pusat perbelanjaan seperti super market dan mall, serta pasar (Supriharjo, 2010).

8. Sektor Transportasi dan Pergudangan

Kegiatan sektor transportasi ditunjang dengan prasarana jaringan jalan serta beberapa sarana seperti terminal, pelabuhan, dan bandar udara (Siregar, 2015).

9. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencakup fasilitas penginapan, serta restoran atau rumah makan (Siregar, 2015).

10. Sektor Informasi dan Komunikasi

Sektor informasi dan komunikasi meliputi kegiatan pos dan giro, telekomunikasi, serta jasa penunjang telekomunikasi. Sarana penunjangnya meliputi warung telekomunikasi (wartel) dan warung internet (warnet) (Lisa, 2011).

11. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Sektor jasa keuangan meliputi kegiatan perbankan serta lembaga keuangan bukan bank (Lisa, 2011).

12. Sektor Real Estat

*Real estate* adalah sebuah properti yang dapat berupa bangunan maupun tanah. Sektor *real estate* mencakup kegiatan jasa penyewaan dalam penjualan atau pembelian (Simphonie, 2010).

[www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

13. Sektor Jasa Perusahaan

Sektor jasa perusahaan meliputi jasa pengacara, jasa akuntan, jasa periklanan, dan sebagainya (Lisa, 2011).

14. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib ditunjang oleh sarana pemerintahan karena kegiatan dalam sektor ini umumnya dilakukan oleh pemerintahan (Simponie, 2010).

15. Sektor Jasa Pendidikan

Fasilitas penunjang sektor jasa pendidikan diantaranya yaitu *Play Group* dan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Khusus (SMK), Akademi, dan Perguruan Tinggi (Supriharjo, 2010).

16. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Sektor kesehatan ditunjang oleh beberapa fasilitas seperti rumah sakit, poliklinik, postandu, puskesmas, praktik dokter, laboratorium, apotik, serta toko obat. Dan untuk sektor kegiatan sosial ditunjang oleh fasilitas seperti fasilitas peribadatan yang meliputi musholla, masjid, gereja, pura, vihara, dan klenteng (Supriharjo, 2010).

17. Sektor Jasa Lainnya

Sektor jasa lainnya meliputi kegiatan seperti jasa perorangan, reparasi komputer, ataupun jasa aktivitas kebugaran (Simponie, 2010).

Berdasarkan penjelasan terkait pendekatan regional yang mengarah pada struktur ruang yang telah dikemukakan oleh pakar. Pendapat-pendapat tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.4 Diskusi dan Komparasi Teori Terkait Struktur Ruang**

NO	SUMBER	STRUKTUR RUANG
1	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007	Pusat-pusat permukiman Sistem prasarana Sistem sarana
2	Surachman (2012)	Pusat pelayanan kegiatan perkotaan Sistem sarana
3	Mahi dan Trigunarso (2017)	Sistem prasarana Sarana dan prasarana penunjang KAPET

NO	SUMBER	STRUKTUR RUANG
4	Tarigan (2004)	Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
		Sektor pertambangan dan penggalian
		Sektor industri pengolahan
		Sektor perdagangan besar dan eceran
		Sektor transportasi dan pergudangan
		Sektor informasi dan komunikasi
		Sektor jasa keuangan dan asuransi
		Sektor real estat
		Sektor jasa perusahaan
		Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib
		Sektor jasa pendidikan
		Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial
Sektor jasa lainnya		

*Sumber: Hasil Pustaka, 2020*

Pada tabel diskusi dan komparasi teori terkait struktur ruang maka dapat diketahui bahwa dalam pendekatan ruang yang mengarah pada struktur ruang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dalam struktur ruang mencakup susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana. Komponen tersebut berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, maka dari itu pada struktur ruang mengidentifikasi kegiatan perekonomian karena setiap kegiatan perekonomian membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang berbeda-beda. Menurut Tarigan (2004), aktivitas kegiatan perekonomian terdiri dari beberapa sektor, salah satunya yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Pada penelitian ini, pendekatan regional digunakan untuk mengetahui wilayah yang mampu untuk mengembangkan sektor unggulan. Sehingga indikator yang akan digunakan yaitu terkait sarana dan prasarana pendukung di masing-masing sektor. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui pusat kegiatan sektor unggulan.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Perencanaan tata ruang dan perencanaan pengembangan wilayah harus memiliki keterkaitan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan wilayah yang akan dikembangkan sebaiknya diarahkan sesuai dengan potensi yang ada,

seperti pusat-pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi yang berkembang di daerah tersebut (Zai dan Pangi, 2017). Arahan pengembangan wilayah dengan melihat potensi-potensi tersebut dibutuhkan beberapa pendekatan seperti pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Dalam penelitian Zai dan Pangi (2017) yang berjudul “Analisis Pengembangan Wilayah dengan Pendekatan Sektoral dan Regional di Kabupaten Bogor” menggunakan variabel PDRB dalam melakukan pendekatan sektoral dan menggunakan variabel kependudukan, sosial, ekonomi wilayah, dan pemanfaatan ruang dalam melakukan pendekatan regional. Analisis yang digunakan dalam pendekatan sektoral yaitu Indeks Kontribusi Sektoral (IKS), *Location Quotient* (LQ), dan *Shift-Share*. Sedangkan analisis yang digunakan dalam pendekatan regional yaitu analisis ekonomi wilayah yang terdiri dari beberapa metode seperti Pendapatan per Kapita, Produktivitas Sektoral, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tipologi Klassen serta analisis struktur ruang yang terdiri dari beberapa metode seperti Metode Skalogram, Sistem Perkotaan, Model Gravitasi, dan Tingkat Kecukupan Fasilitas Pelayanan.

Dalam penelitian Sundari dan Sudrajat (2019) dengan judul “Analisis Pengembangan Wilayah Kota Semarang Berbasis Potensi Unggulan Daerah” menggunakan 3 (tiga) analisis diantaranya yaitu analisis *Location Quotient* (LQ), analisis Tipologi Klassen, dan Analisis *Shift-Share*. Variabel yang digunakan dalam melakukan analisis tersebut yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu arahan pengembangan wilayah Kota Semarang difokuskan pada beberapa sektor unggulan agar Kota Semarang berkembang sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Namun, pengembangan wilayah Kota Semarang membutuhkan pemetaan keberadaan potensi unggulan secara spasial dengan melihat pada dokumen RTRW Kota Semarang.

Filipus, *et al* (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Struktur Ruang Berdasarkan Pusat Pelayanan di Kabupaten Minahasa Utara” dengan menggunakan analisis skalogram untuk mengetahui pusat pengembangan dan sarana prasarana pembangunan, analisis pusat pelayanan untuk menentukan pusat dan sub pusat pelayanan wilayah, dan analisis evaluasi untuk membandingkan antara kondisi fisik dengan dokumen. Variabel yang digunakan dalam analisis

skalogram yaitu berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari jumlah penduduk dan 14 (empat belas) fasilitas seperti fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, dan fasilitas kesehatan. Sedangkan variabel yang digunakan dalam analisis pusat pelayanan terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) yang dilakukan berdasarkan data pada dokumen RTRW. Untuk penjelasan lebih rinci terkait penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dapat dilihat pada tabel berikut:



[www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

www.itk.ac.id  
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	ANALISIS	HASIL PENELITIAN	KONTRIBUSI PENELITIAN
1	Zai dan Pangi (2017)	Analisis Pengembangan Wilayah dengan Pendekatan Sektoral dan Regional di Kabupaten Bogor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDRB</li> <li>2. Jumlah Penduduk</li> <li>3. Jumlah Tenaga Kerja</li> <li>4. Jumlah Fasilitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kontribusi Sektoral (IKS)</li> <li>2. <i>Location Quotient (LQ)</i></li> <li>3. <i>Shift-Share</i></li> <li>4. Ekonomi Wilayah</li> <li>5. Struktur Ruang</li> </ol>	Arahan pembangunan wilayah mengarah pada pengembangan sektor-sektor unggulan, pengembangan sektor berkembang, pengembangan sektor yang diprediksi dapat maju di masa yang akan datang, pengembangan sektor industri pengolahan, pengembangan sektor unggulan pada wilayah dengan pusat pelayanan, pengembangan sub sektor perikanan dan pertanian esrta sektor pariwisata dan bisnis kuliner, menyusun program penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan wilayah tetangga, perbaikan jalan, dan perbaikan mutu pendidikan.	Penelitian ini dijadikan acuan dalam menentukan pendekatan dan alat analisis untuk dapat merumuskan arahan pengembangan wilayah.
2	Sundaro dan Agus (2019)	Analisis Pengembangan Wilayah Kota Semarang Berbasis Potensi Unggulan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDRB Kota Semarang</li> <li>2. PDRB Provinsi Jawa Tengah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Location Quotient (LQ)</i></li> <li>2. Tipologi Klassen</li> <li>3. <i>Shift-Share</i></li> </ol>	Arahan kebijakan dalam pengembangan wilayah Kota Semarang berfokus pada sektor unggulan sehingga Kota Semarang dapat berkembang sesuai potensi unggulan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Namun, agar kebijakan pengembangan wilayah lebih terarah maka dibutuhkan pemetaan potensi unggulan secara spasial yang	Penelitian ini dijadikan acuan dalam menentukan sektor unggulan serta dalam menentukan alat analisis yang digunakan.

NO	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	ANALISIS	HASIL PENELITIAN	KONTRIBUSI PENELITIAN
					merujuk pada dokumen RTRW Kota Semarang	
4	Fillips, <i>et al</i> (2019)	Analisis Struktur Ruang Berdasarkan Pusat Pelayanan di Kabupaten Minahasa Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Penduduk</li> <li>TK</li> <li>SD</li> <li>SMP</li> <li>SMA</li> <li>Perguruan Tinggi</li> <li>Masjid</li> <li>Gereja</li> <li>Puskesmas</li> <li>Polindes</li> <li>Rumah Sakit</li> <li>Pasar</li> <li>SPBU</li> <li>Terminal</li> <li>Dermaga</li> <li>PKN</li> <li>PKWp</li> <li>PPK</li> <li>PKL</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Analisis Skalogram</li> <li>Analisis Pusat Pelayanan</li> <li>Analisis Evaluasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Infrastruktur di Minahasa Utara sudah memiliki kualitas yang baik</li> <li>Fasilitas umum dan sosial seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan terdapat di setiap kecamatan dengan kondisi cukup baik</li> <li>Berdasarkan analisis scalogram terdapat 4 (empat) hirarki struktur ruang</li> <li>Permasalahan struktur ruang di Kabupaten Minahasa Utara diantaranya yaitu kondisi beberapa jalan dalam keadaan rusak dan ketidaksesuaian antara hirarki struktur ruang pada RTRW dan kondisi eksisting</li> </ol>	<p>Penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan alat analisis pada pendekatan regional, serta dalam melakukan analisis skalogram dan indeks sentralitas untuk menentukan pusat pelayanan.</p>

Sumber: Analisis Penulis, 2020

## 2.5 Sintesa Pustaka

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka yang dikemukakan oleh para ahli, dapat diketahui indikator serta variabel yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran penelitian dengan judul Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan di Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Sintesa Pustaka**

NO	SASARAN	INDIKATOR	VARIABEL	SUMBER	
1	Menganalisis sektor unggulan berdasarkan pendekatan sektoral	Pertumbuhan ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Kesuma dan I Made (2015) dan Hasibuan (2015)	
2	Menganalisis struktur ruang berdasarkan pendekatan regional	Sarana dan Prasarana Penunjang KAPET	Jaringan jalan	Mahi dan Trigunarso (2017)	
			Sarana pengairan		
			Jembatan		
			Terminal		
			Pasar		
			Kios		
			Jaringan listrik		
			Jaringan telekomunikasi		
			Bank		
			Jaringan air bersih		
			Sarana kesehatan		
			Sarana pendidikan		
			Sarana peribadatan		
			Pelabuhan		Padmini, <i>et al</i> (2016)
			Terminal		
			Gudang		
Pasar					
Bendungan					
Sumur pompa					
Saluran irigasi					
Drainase					
Jaringan jalan	Putri (2017) dan Bappenas (2005)				
Pelabuhan					
			Jaringan jalan		

NO	SASARAN	INDIKATOR	VARIABEL	SUMBER
		Sarana dan Prasarana Sektor Pertambangan	Jalur rel	
			Persampahan	
			Jaringan listrik	Pedoman Teknis Pengembangan Kawasan Industri di Daerah Tahun 2001
		Sarana dan Prasarana Sektor Industri	Jaringan telekomunikasi	
			Jaringan air bersih	
			Jaringan air drainase	
			Jaringan jalan	
		Prasarana Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	Jaringan listrik	Destiningsih, <i>et al</i> (2019)
		Sarana dan Prasarana Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Persampahan	
			Jaringan air bersih	Destiningsih, <i>et al</i> (2019)
			Saluran irigasi	
		Sarana dan Prasarana Sektor Konstruksi	Pelabuhan	
			Jaringan jalan	Destiningsih, <i>et al</i> (2019)
			Jembatan	
			Irigasi	
		Sarana Sektor Perdagangan	Warung/kios	
			Rumah makan/restoran	
			Pertokoan	Supriharjo (2010)
			Super market	
			Mall	
			Pasar	
		Sarana dan Prasarana Sektor Transportasi	Terminal	
			Pelabuhan	Siregar (2015)
			Bandar Udara	
			Jaringan jalan	
		Sarana Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Penginapan	
			Rumah makan/restoran	Siregar (2015)
			Warung telekomunikasi	Lisa (2011)

NO	SASARAN	INDIKATOR	VARIABEL	SUMBER
		Sarana Sektor Informasi dan Komunikasi	Warung internet	
		Sarana Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi	Bank	Lisa (2011)
		Sarana Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Sarana pemerintahan	Simponie (2010)
		Sarana Sektor Jasa Pendidikan	<i>Play group</i> dan TK	Supriharjo (2010)
			SD	
			SMP	
			SMA	
			SMK	
			Akademi	
			Perguruan tinggi	
			Rumah sakit	
			Poliklinik	
			Posyandu	
		Sarana Sektor Kesehatan	Puskesmas	Supriharjo (2010)
			Praktik dokter	
			Laboratorium	
			Apotik	
			Toko obat	
		Sarana Sektor Kegiatan Sosial	Musholla	Supriharjo (2010)
			Masjid	
			Gereja	
			Pura	
			Vihara	
			Klenteng	

*Sumber: Hasil Pustaka, 2021*

Penentuan variabel pada sintesa pustaka dilakukan berdasarkan teori-teori oleh para ahli. Dalam melakukan analisis sektor unggulan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi. Hal ini didasari berdasarkan teori terkait pendekatan sektoral.

Selain itu, dalam melakukan analisis struktur ruang berdasarkan pendekatan regional dilakukan dengan menggunakan indikator berupa sarana dan prasarana penunjang kegiatan sektor. Untuk variabel yang digunakan yaitu terkait jenis sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan sektor perekonomian.



[www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)